

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP)

**SEKRETARIAT
KECAMATAN WOYLA BARAT
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala yang telah menganugerahkan kesehatan, kesempatan serta kelapangan dalam berfikir karena hanya atas berkat waktu dan kesempatan yang telah diberikan-Nya kami telah dapat merampungkan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Kecamatan Woyla Barat Tahun 2022. Shalawat beriring salam kemudian tak lupa juga kami haturkan ke pangkuan alam Nabi Besar Muhammad SAW, dimana berkat kerja keras Beliau kita telah dapat menjadi manusia yang berakhlakul karimah sebagaimana yang telah dapat kita rasakan saat ini.

Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang dijalankan merupakan tahun empat pelaksanaan RPJM Kecamatan Woyla Barat Tahun 2017 – 2022 dan tahun keempat juga untuk pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat tahun 2017–2022. Ada beberapa keberhasilan berkat buah pikiran dan kerjasama seluruh staf. Namun demikian, kami menyadari bahwa masih dijumpai tantangan dan masalah, sehingga masih ada sasaran yang belum sesuai target yang direncanakan. Optimisme yang tinggi senantiasa tetap dimiliki untuk lebih meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Woyla Barat disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah, dengan komitmen dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kinerja Kecamatan Woyla Barat

Akhirnya laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Pasi Mali , 20 Januari 2023

CAMAT WOYLA BARAT

IRWAN, M.Si

NIP. 19740626 200803 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang ada dengan memperhitungkan potensi dan peluang pembangunan, maka visi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017–2022 adalah: **“TERWUJUDNYA ACEH BARAT YANG ISLAMI, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG TRANSPARAN, KREDIBEL, AKUNTABEL DAN TERINTEGRITAS”**

Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat ini mencerminkan arah pembangunan Kabupaten Aceh Barat dalam masa lima tahun ke depan yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017–2022. Visi ini juga seiring dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat. Untuk Tahap Pembangunan ke- 4 masa RPJM Kabupaten Aceh Barat bertekad untuk lebih memantapkan penataan kembali Kabupaten Aceh Barat di segala bidang. Serasi dan seimbang dalam suatu mekanisme kerja yang sistematis dan terpadu. Di sisi lain Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat berperan sebagai advisor dalam perumusan kebijakan publik yang mengandung arti memberikan pedoman, bimbingan, arahan dan supervisi dalam upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Aceh Barat untuk mendukung pelaksana dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang bersih, transparan dan akuntabel. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat didalam Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah mengacu pada RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017–2022, dimana indikator yang digunakan adalah indikator yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran pelaksanaan dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat dimaksud, dengan merumuskan strategi, kebijakan dan program kerja / kegiatan seperti dirumuskan didalam RPJM.

Akhirnya laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Pasi Mali , 20 Januari 2023

CAMAT WOYLA BARAT

IRWAN, M.Si

NIP. 19740626 200803 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTARTABEL	v
DAFTARGAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Susunan Organisasi Kecamatan Woyla Barat.....	3
D. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Woyla Barat	5
E. Sumber Daya Manusia.....	13
F. Sumber Asset	16
G. Identifikasi Permasalahan Internal dan Ekternal Kecamatan Woyla Barat	17
H. Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Woyla Barat	19
I. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Baratahun 2017-2022.....	22
B. Rencana Strategis Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022	29
C. Penetapan Kinerja Kecamatan Woyla Barat Tahun 2021.....	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Woyla Barat 2021	37
B. Evaluasi dan Analisis Capaian kinerja Kecamatan Woyla Barat 2021.....	40
C. Realisasi Anggaran Tahun 2021	41
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	47
B. Saran - saran.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah PNS dan THL pada Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Tahun 2021 Berdasarkan Tingkat dan Golongan	14
Tabel 1.2	Jumlah PNS pada Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Tahun 2021 Berdasarkan Pendidikan	15
Tabel 1.3	Jumlah Asset/Inventaris pada Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Tahun 2021	16
Tabel 2.1	Perumusan Penjelasan Visi Kabupaten Aceh Barat	24
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan RPJMD	31
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Sekretariat Kec. Woyla Barat	33
Tabel 2.4	Penetapan Kinerja 2017-2022	34
Tabel 2.5	Rencana Kinerja 2021	35
Tabel 2.6	Rencana Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif 2021	37
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja Progres Positif.....	41
Tabel 3.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja Progres Positif.....	41
Tabel 3.3	Skala Nilai Peringkat Efisiensi	42
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Kecamatan Woyla Barat Tahun 2021	42
Tabel 3.5	Perbandingan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2019 Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat	44
Tabel 3.6	Perbandingan Program, Kegiatan dan Rencana Kerja Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 antara Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021	44
Tabel 3.7	Target dan Realisasi Keuangan Tahun 2021.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Sekretariat Kecamatan Woyla Barat.....	4
Gambar 1.2	Proporsi Pegawai Negeri Sipil dan THL Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Berdasarkan Tingkat Golongan	14
Gambar 1.3	Proporsi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan	15

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pengembangandan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 secara garis besarnya berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Woyla Barat Kabupaten ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakanbagiandari implementasi Sistem Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik(*goodgovernance*) di Indonesia.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja InstansiPemerintah (LKjIP) Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 ini merupakan laporan pelaksanaan Kinerja dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Barat.

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahanyang jelas,

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2021 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan yang ingin diharapkan dari tersusunnya LKjIP Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan Informasi sekaligus motivasi bagi Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang mengacu kepadaperaturan danperundang-undanganyangberlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Sebagai bahan Evaluasi terhadap Kinerja Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat sehingga diharapkan dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.
3. Hasil Evaluasi yang berupa kritik dan saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Kecamatan Woyla Barat di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.
4. Menjagadan meningkatkan kepercayaan masyarakat Kabupaten Aceh Barat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat.

C. Susunan Organisasi Sekretariat Kecamatan Woyla Barat

Adapun Susunan Organisasi Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat, sebagai berikut :

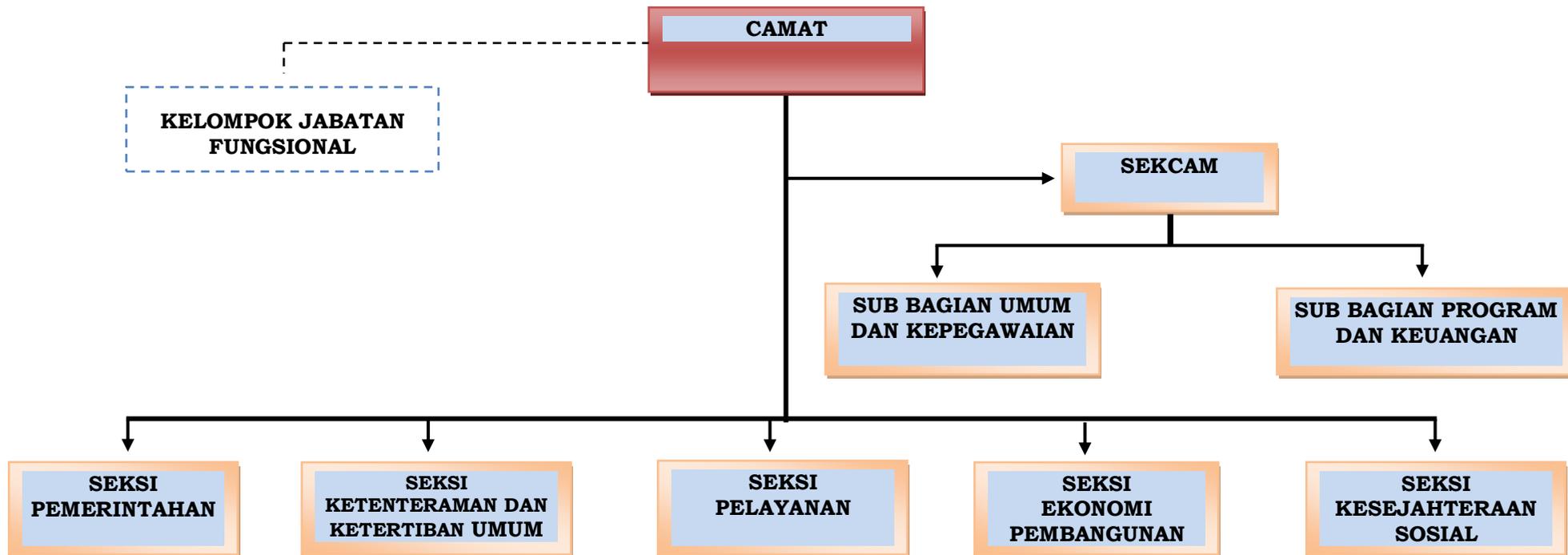
- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pelayanan;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan;
- g. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional:

Untuk memaparkan susunan organisasi Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat berikut di bawah ini ditampilkan

struktur organisasi Sekretariat Kecamatan Woyla Barat dalam Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagai berikut:



Gambar 1.1
Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat



Bagan Organisasi Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat

Sumber : Peraturan Bupati Aceh Barat No. 74 Tahun 2016

D. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat

Dasar Hukum pembentukan Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat Adalah Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kecamatan Woyla Barat Tipe A merupakan Perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu

Kecamatan Woyla Barat dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Berdasarkan urutan Kedudukan diatas berikut dijelaskan tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai dengan jabaran dibawah ini yaitu:

Camat

- (1) Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong;
 - c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati;
 - e. pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong;
 - h. penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - i. pengoordinasian pelaksanaan kewenangan pemerintah kabupaten yang dilimpahkan kepada kecamatan;
 - j. pengoordinasian penyelenggaraan keistimewaan aceh dan peningkatan syariat islam;

- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Setcam

- (1) Setcam mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perencanaan, keuangan, perlengkapan serta memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
- (2) Setcam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran;
 - c. pembinaan pelaksanaan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan hubungan masyarakat;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan kecamatan;
 - e. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan;
 - f. pembinaan pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kehumasan, dan pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kerja;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Subbagian Program dan Keuangan

- (1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi keuangan.
- (2) Subbagian Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan penyusunan anggaran;
 - c. pelaksanaan penyusunan Akuntabilitas Kinerja dan Inovasi Pelayanan Publik;
 - d. pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;

- e. pelaksanaan tata usaha keuangan;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan mukim dan gampong, pelayanan administrasi pertanahan, kependudukan, dan pencatatan sipil serta pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten yang dilimpahkan kepada kecamatan.
- (2) Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong;
 - b. pelaksanaan fasilitasi pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Imuem Mukim dan Keuchik serta perangkat Pemerintahan Mukim dan Gampong;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan rekomendasi pembentukan, penghapusan, pemekaran, penggabungan, pemindahan, perubahan nama dan batas gampong;
 - d. pelaksanaan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pengelolaan administrasi gampong;
 - e. pembinaan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan umum dengan instansi/unit kerja terkait di wilayah kecamatan;
 - g. pelaksanaan pelayanan administrasi pertanahan;
 - h. pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan umum, Pemerintahan Mukim dan Gampong;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan Muspika dalam penyelenggaraan stabilitas dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban;
 - b. pelaksanaan fasilitasi sosialisasi Qanun dan Peraturan Bupati;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati;

- d. pengoordinasian pemberian rekomendasi pelaksanaankeramaian rakyat;
- e. pelaksanaan koordinasi dalam pencegahan timbulnya kerawanan dan keresahan di masyarakat;
- f. penertiban dan pengawasan pelaksanaan perizinan lingkup kecamatan;
- g. pelaksanaan fasilitasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di lingkup kecamatan;
- h. pendampingan pungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- i. pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan, LSM dan lembaga kemasyarakatan;
- j. pelaksanaan koordinasi pengurangan resiko, pencegahan dan penanggulangan bencana alam dengan instansi terkait;
- k pelaksanaan koordinasi penegakan syariat islam dengan instansi terkait;
- l. pelaksanaan koordinasi pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa pada organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan dengan instansi terkait;
- m.pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan politik dalam negeri, ideologi negara, kesatuan bangsa, ketenteraman dan ketertiban umum;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pelayanan

- (1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan, perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Seksi Pelayanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN);
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi pelayanan kartu tanda penduduk dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. pelaksanaan koordinasi pemberian rekomendasi perizinan dan non perizinan;
 - e pelaksanaan koordinasi dengan satuan perangkat kerja kabupaten yang menangani pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Ekonomi Pembangunan

- (1) Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong.

- (2) Seksi Ekonomi Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pendataan dan analisis potensi ekonomi dan swadaya masyarakat gampong;
 - b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - c. pelaksanaan fasilitasi, supervisi dan evaluasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG), Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG) tahunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG);
 - d. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, pemantauan dan supervisi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG); pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengelolaan Anggaran Dana Desa dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi serta pembinaan/pengembangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG);
 - g. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ekonomi produktif bidang pertanian dan tanaman pangan, perikanan dan kelautan, peternakan, kehutanan, kerajinan industri kecil dan koperasi;
 - h. pelaksanaan koordinasi penyuluhan pengembangan ekonomi produktif dengan satuan kerja perangkat kabupaten terkait;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat gampong dan kecamatan;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan;
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kesejahteraan Sosial

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan sosial kemasyarakatan.
- (2) Seksi Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan pendidikan, pendidikan luar sekolah, dayah/pesantren dengan instansi/lembaga terkait;
 - b. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan fasilitasi kesehatan dasar, kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan instansi/lembaga terkait;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perlindungan anak dan pengaduan kasus kekerasan dalam rumah tangga;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan syiar islam;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyaluran bantuan sosial;

- g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kegiatan kepemudaan dan olah raga, pramuka, pemberdayaan perempuan dan PKK;
- h. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pemberdayaan anak yatim;
- i pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi sosial;
- j. pelaksanaan pendataan dan pengolahan data bidang kesejahteraan sosial; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Sumber Daya Manusia

Salah satu instrumen penunjang pelaksanaan tugas pokok Sekretariat Kecamatan Woyla Barat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai dengan analisa jabatan dan berkompotensi.

Sekretariat Kecamatan Woyla Barat memiliki jumlah pegawai sebanyak 37 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 30 orang (5 orang sebagai Sekgam), pegawai THL sebanyak 7 orang Berikut dibawah ini ditampilkan data jumlah PNS berdasarkan tingkat golong dan tingkat pendidikan pada Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat.

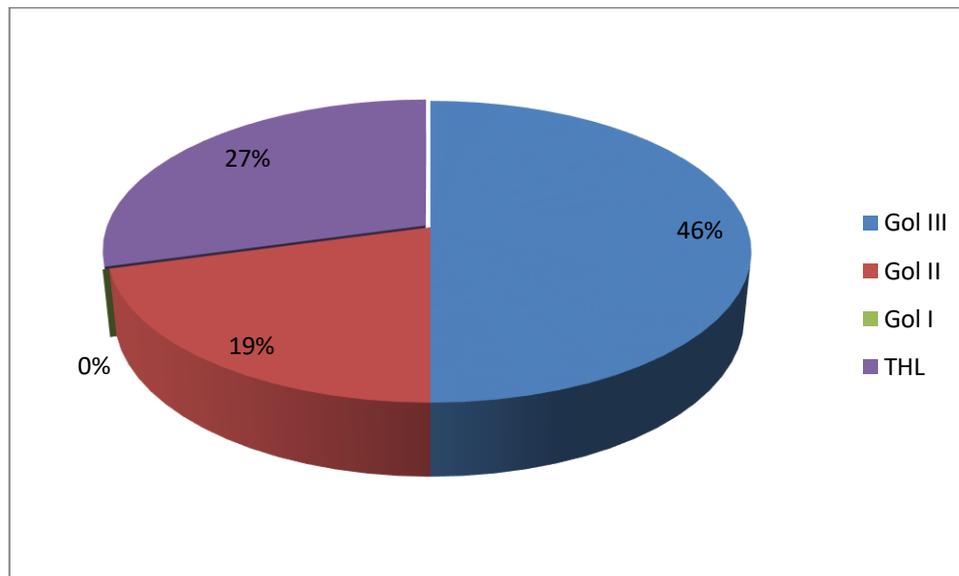
Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan THL pada Kantor Kecamatan Woyla Barat
Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2022

No	Golongan	Jumlah	Persen (%)
1	Golongan IV	2	8
2	Golongan III	12	46
3	Golongan II	5	19
4	Golongan I	0	0
5	THL	7	27
Jumlah		26	100

Sumber: Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat, 2021

Berdasarkan tabel di atas, PNS Kantor Camat Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat didominasi oleh tingkatan Golongan III sebanyak 12 orang (46%) selanjutnya Golongan II sebanyak 5 orang (19%), sementara Golongan IV sebanyak 2 orang (8%), Golongan I sebanyak 0 orang (0%) dan THL sebanyak 7 orang (27%) seperti yang ditampilkan dalam diagram berikut ini :

Gambar 1.2
Proporsi Pegawai Negeri Sipil dan THL pada Sekretariat Kecamatan Woyla Barat



Berdasarkan Tingkat Golongan

Sumber : Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat, 2021

Tabel 1.2.

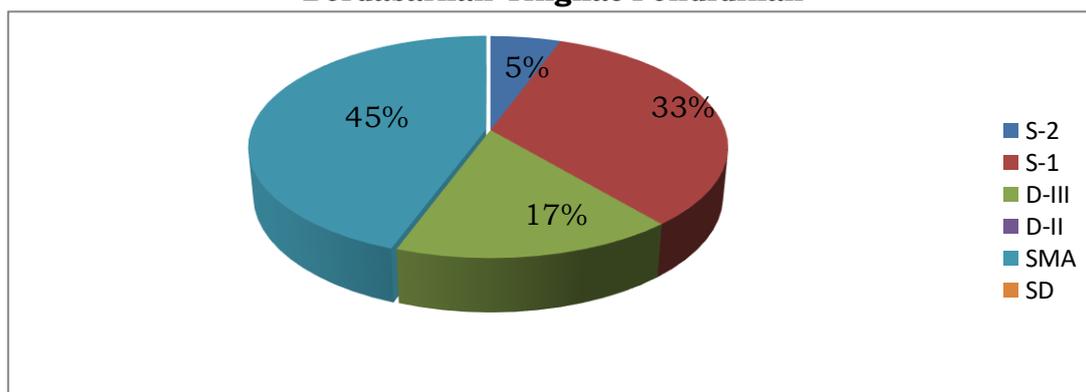
Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Golongan	Jumlah	Persen
1	Strata 2	2	5
2	Strata 1	6	33
3	Diploma 3	3	17
4	Diploma 2	0	0
5	SLTA	8	45
6	SMP	0	0
Jumlah		19	100

Sumber: Sekretariat Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat, 2021

Mengacu pada tabel di atas, PNS Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat didominasi oleh tingkat pendidikan SLTA sebanyak 45 % Selanjutnya Strata 1 sebanyak 33 %, pendidikan Strata 1 sebanyak 5% Sementara untuk tingkat D-III 17 %. Pendidikan tingkat D-II 0 % dan SMP proporsinya 0 %.

Gambar1.3
Proporsi Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Kecamatan Woyla Barat
Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber :Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat, 2021

F. SUMBER ASSET

Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat sampai dengan saat ini memiliki berbagai aset kantor baik yang berasal dari pengadaan oleh pemerintah daerah, provinsi, pusat maupun hibah dari lembaga non pemerintah. Berikut di bawah ini ditampilkan tabel nama dan jumlah aset yang dimiliki Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat sampai dengan akhir tahun 2022.

Tabel 1.3
Nama dan Jumlah Aset pada Sekretariat Kecamatan Woyla Barat
Kabupaten Aceh Barat

No	Nama Aset	Jumlah	Ket
1.	Mobil	3	
2.	Sepeda Motor	2	
3.	Scaner	-	
4.	Air Conditioning System	-	
5.	Mesin Ketik	1	
6.	Mesin Kalkulator	2	
7.	Filling Besi/Metal	4	
8.	Papan Pengumuman	1	
9.	Peta	1	
10.	Kursi Putar	17	
11.	Kursi Biasa	50	
12.	Kursi Lipat	6	
13.	Meja Komputer	2	
14.	Meja Biro	4	
15.	Stabilizer	2	

16.	Dekstop PC	1	
17.	Monitor	3	
18.	Signature Pad	2	
19.	Kain Latar	2	
20.	Meja ½ Biro Kayu	9	
21.	Sofa	1	
22.	Jam Dinding	2	
23.	Kipas Angin	12	
24.	Televisi	1	
25.	Wireless	1	
26.	Dispenser	1	
27.	Lap Top	3	
28.	Printer	3	
29.	Server	1	
30.	Meja Kerja Pegawai	25	
31.	Kursi Kerja Pegawai	25	
32.	Lemari Arsip	6	
33.	UPS	4	
34.	Hardisk Eksternal	1	
35.	Tripod	2	
36.	Iris Scanner	2	
37.	Jaringan Komunikasi Data	1	
38.	Speaker + Mic	2	
39.	Proyektor + Attachment	1	
40.	Ventilation Fan	1	
41.	Stationary Water Pumb	1	
42.	Sound System	1	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat, 2022

G. Identifikasi Permasalahan Internal Dan Eksternal Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat

Kinerja pelayanan Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat bila dikaitkan dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) masih ditemukan beberapa permasalahan kinerja pelayanan yang belum mencapai target. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain adalah:

Permasalahan Internal dan Eksternal :

1. **Bidang Pemerintah,** masih tingginya konflik antara aparat desa dengan masyarakat terutama menyangkut masalah-masalah keterbukaan dan transparansi serta bantuan, adanya konflik perbatasan, dan belum optimalnya pelayanan melalui Loker Pelayanan terpadu, belum aktifnya Lembaga Tuha Peut sebagaimana mestinya, masih rendahnya mutu aparatur desa dan lainnya.
2. **Bidang Sosial Keagamaan,** masih adanya hambatan dalam koordinasi, rendahnya kesadaran masyarakat untuk pengembangan nilai agama karena kurang aktifnya dakwah agama serta kegiatan sosial lainnya terutama dalam mengoptimalkan fungsi Mesjid dan lembaga pendidikan agama/dayah,

pemberdayaan perempuan, olah raga, peran pemuda, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kegiatan kesenian, buruknya kedisiplinan aparatur pelayanan kesehatan, tidak begitu optimalnya pelayanan Posyandu, serta mulai pudarnya nilai Gotong Royong;

3. **Bidang Sosial Kesejahteraan Rakyat**, masih terdapat data kemiskinan yang tidak akurat maka perlu pemutakhiran data secara partisipatif dan berkelanjutan guna memudahkan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran;
4. **Bidang pembangunan**, semakin apatisnya masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang yang tidak didukung oleh besarnya serapan Aspirasi Musrenbang terhadap anggaran;
5. Bidang Trantib masih banyak ditemukan ternak yang dilepas, pelanggaran Dinul Islam Pelaksanaan Penertiban Umum lainnya;
6. Masih kurangnya pemahaman satuan kerja perangkat daerah di kecamatan seperti UPTD Pendidikan, Puskesmas, UPTD Penyuluh Pertanian akan arti pentingnya Kecamatan sebagai pusat koordinasi di kecamatan dan ini ditambah lemahnya kemampuan kecamatan dalam melaksanakan koordinasi dimaksud;
7. Belum tersusunnya Protap pelayanan masyarakat menyebabkan pelayanan yang diberikan tidak standar dan masih terbatasnya dana untuk kegiatan dan program kecamatan;
8. Masih rendahnya jiwa pelayanan dan SDM aparatur kecamatan dan desa baik kepemimpinan, pengetahuan dan Ketrampilan serta sikap dalam melayani termasuk Penguasaan teknologi informasi sangat rendah serta Budaya kerja dan disiplin masih perlu ditingkatkan.

H.Landasan Hukum Penyusunan

Dasar hukum Penyusunan LKjIP Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 sebagaimana diamanatkan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Keputusan Presiden Nomor 228/M/2001 Tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong
4. Keputusan Presiden Nomor 163/M/1998 Tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Administrasi Negara;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;

6. Keppres RI Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah 2 kali diubah, terakhir dengan Keppres RI Nomor 48 Tahun 2002;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Kepala LAN Nomor 1049A/IX/6/4/2001 yang telah diubah dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 171/IX/6/4/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara;
10. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 yang telah diubah menjadi Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/Ix/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kepala Lembaga Administrasi Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Jo, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) terdiri dari 4 (empat) bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN, memuat Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Manusia, Asset, Identifikasi Masalah Internal dan Eksternal, Landasan Hukum Penyusunan, Sistematika Penyusunan.

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA, memuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat 2017–2022, Rencana Strategis Kantor Camat Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat 2017–2022, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat, Strategi dan Kebijakan, Penetapan Kinerja Sekretariat Kecamatan Woyla Barat 2017–

2022, Rencana Kerja Sekretariat Kecamatan Woyla Barat 2021, Rencana Anggaran 2021, Penetapan Kinerja Sekretariat Kecamatan Woyla Barat

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT KECAMATAN WOYLA BARAT2021, memuat Pengukuran Kinerja 2021, Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat2021, Pengukuran Akuntabilitas Keuangan 2021.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kab. Aceh Barat 2017-2022

1. Visi RPJMD 2017-2022

Perencanaankinerja merupakan dokumentasirencanapembangunan daerah yangditentukan dalam jangka waktu tertentu.Perencanaan kinerja Tahun 2017-2022 Kabupaten Aceh Barat telah ditetapkan dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2014 tentang RPJMD Tahun 2017-2022. Adapun dokumen rencana kinerja akan dijabarkan dalam sub bab berikut.

BerdasarkanQanun Kabupaten Aceh Barat Nomor Tahun2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat.RPJMD, maka visi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022adalah:

“ TERWUJUDNYA ACEH BARAT YANG ISLAMI, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG TRANSPARAN, KREDIBEL, AKUNTABLE DAN TERINTEGRITAS”

Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat ini mencerminkan arah pembangunan Kabupaten Aceh Barat dalam masa lima tahun ke depan. Visi ini juga seiring dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat untuk tahun 2017-2022 yakni untuk lebih memantapkan penataan kembali Kabupaten Aceh Barat di segala bidang dengan menekankanupaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Mewujudkan visi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 terdapat tiga kata kunci, antara lain **(1) Islami (2) Pembangunan dan (3) Ekonomi Kerakyatan**.Secara teknis pelaksanaannya didukung dengan empat pendekatan, yaitu Transparansi, Kredibel, Akuntable dan Terintegritas.Untuk itu setidaknya ada 7 (tujuh) hal yang memiliki urgensi yang patut digaris bawahi dan perlu penjabaran lebih lanjut agar tidak terjadi multitafsir/ambigu terhadap visi yang ditetapkan. Berikut dijelaskan penjabaran sebagaimana dimaksud:

- Islami : Pemerintah dan masyarakat Aceh Barat dalam melaksanakan pembangunan sosial kemasyarakatan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islami dan nilai luhur Pancasila dengan mengedepankan amar ma'ruf dan nahi mungkar untuk mewujudkan keadilan sosial (*Baldataun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*).
- Pembangunan : Pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat, untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana, dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat.
- Ekonomi Kerakyatan : Membangun ekonomi kerakyatan dilaksanakan dengan menganut sistem perekonomian pada kekuatan ekonomi rakyat. Dengan kata lain ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi yang dapat memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat dalam berpartisipasi aktif meningkatkan perekonomian dalam berbagai usaha-usaha produktif.
- Transparansi : Pemerintah Aceh Barat dalam berbagai kebijakan pembangunan selalu terbuka menyediakan informasi yang lengkap untuk kebutuhan masyarakat dalam pengambilan keputusan guna menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Kredibel : Mewujudkan pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang amanah dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
- Akuntabel : Mewujudkan pemerintahan yang memberikan pertanggungjawaban dengan berlandaskan pada berbagai aturan dan perundang - undangan yang berlaku.
- Terintegritas : Mewujudkan pemerintahan yang memiliki konsistensi antara tindakan dengan nilai-nilai keislaman dan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Tabel 2.1.
Perumusan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
“Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatanyang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegritas”	Islami	Pemerintah dan masyarakat Aceh Barat dalam melaksanakan pembangunan sosial kemasyarakatan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islami dan nilai luhur Pancasila dengan mengedepankan amar ma’ruf dan nahi mungkar untuk mewujudkan keadilan sosial (<i>Baldataun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur</i>).
	Pembangunan	Pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat, untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana, dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat.
	Ekonomi Kerakyatan	Membangun ekonomi kerakyatan dilaksanakan dengan menganut sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat. Dengan kata lain ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi yang dapat memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat dalam berpartisipasi aktif meningkatkan perekonomian dalam berbagai usaha-usaha produktif

2. Misi RPJMD 2017-2022

Dalam rangka pencapaian visi kepala daerah Tahun 2017-2022 tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menetapkan 8 (delapan) misi, yaitu :

- 1. Mengembalikan Kabupaten Aceh Barat yang syar’i dan mewujudkan Pemerintahan Aceh Barat yang bersih.** Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah dalam setiap sendi-sendi kehidupan (pemerintah dan masyarakat). Di sisi lain, kebijakan penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dapat terhindar dari korupsi,

kolusi dan nepotisme (KKN). Semua itu dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang ditandai dengan adanya perbaikan kinerja birokrasi di setiap lini secara cepat, murah, transparan dan akuntabel melalui pendidikan agama, aqidah dan akhlak.

- 2. Mewujudkan perdamaian Aceh yang abadi sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945, MoU Helsynki dan UUPA.** Kegiatan ini dilakukan; Pertama, mensosialisasikan dan mengimplementasikan MoU Helsynki kepada pelajar dan mahasiswa. Kedua, meningkatkan pemahaman mantan kombatan tentang kehidupan berbangsa, bernegara dan berpolitik. Ketiga, memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang perdamaian, hukum dan terorisme.
- 3. Membangun ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sektor SDA dengan pengelolaan terintegrasi berlandaskan tata ruang dan peta kebencanaan.** Membangun ekonomi kerakyatan pada sektor Sumber Daya Alam (SDA) dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam, antara lain sektor pertanian, perkebunan/kehutanan, kelautan dan pertambangan dengan memberikan modal usaha melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan koperasi dengan melibatkan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda). Di sisi lain, pembangunan berkaitan dengan mitigasi dan penanganan kebencanaan dilaksanakan melalui penempatan bidang mitigasi bencana di salah satu SKPK, seperti BPBD atau Dinas Sosial melalui kerjasama dengan kampus-kampus khususnya dengan pusat kajian kebencanaan dengan sistem koordinasi kebencanaan yang terintegrasi dengan semua SKPK.
- 4. Meningkatkan kesejahteraan sumberdaya manusia seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), TenagaKontrak (THL) dan Teungku Dayah.** Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan mempersiapkan Sumber daya Manusia Aceh Barat dalam menghadapi persaingan global melalui peningkatan kesejahteraan dan pendidikan.
- 5. Mengembangkan dan melestarikan objek wisata spiritual, seni, budaya, adat dan adat-istiadat serta olahraga sesuai dengan potensi kedaerahan (kearifan lokal).**Langkah-langkah yang dilakukan, antara lain: Pertama, dalam bidang pelestarian objek wisata spiritual, pemerintah melakukan pemugaran objek-objek wisata bersejarah/spiritual sebagai potensi wisata lokal, nasional dan internasional. Kedua, seni dan budaya yaitu mengidentifikasi seni tadisional khas Aceh, memberikan pembinaan secara intensif serta mengirim dan mementaskan/mempromosikan seni tradisional kabupaten Aceh Barat baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional, sebagai upaya pelestarian warisan leluhur bangsa. Ketiga, dalam bidang adat dan adat istiadat menumbuhkembangkan tradisi/kebiasaaan yang ada di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan tatanan aturan Syar'i sebagai piranti pengaruh budaya global. Ketiga, hal dimaksud dapat dioptimalkan melalui pemberdayaan lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Barat. Keempat, bidang keolahragaan dengan melibatkan pelajar, pemuda dan mahasiswa dengan memberdayakan Komite Olahraga Nasional (KONI).

6. Pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur pendukung dalam mewujudkan Aceh Barat sebagai zona ketahanan pangan nasional.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta membuka daerah terisolir guna perikananmeningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan hasil produksi pertanian, perikanan, perkebunan dan perternakan. Pemerintah secara berkesinambungan akan membangun fasilitas sarana jalan, irigasi, perluasan area lahan pertanian, seperti pembukaan lahan sawah baru, lahan tanaman palawija dengan menggalakkan kembali “*Budaya Meuseuraya*” sebagai semangat keacehan. Di samping itu, pemerintah juga menyediakan bibit unggul, pupuk, peralatan pertanian, Teknologi Tepat Guna (TTG) dan membuka akses yang lebih mudah bagi para petani dalam mengelola lahan pertanian guna mendukung ketahanan pangannasional. Optimalisasi stabilitas harga pasar hasil-hasil pertanian masyarakat, pemerintah juga membentuk satuan tugas (satgas) melalui SKPK terkait yang berkerjasama dengan berbagai kabupaten dan kota di Indonesia. Pemerintah dalam bidang perternakan mengembangkan perternakan terpadu berwawasan agribisnis.

7. Memberikan pelayanan kesehatan menuju masyarakat Aceh Barat yang sehat jasmani dan rohani serta meningkatkan SDM bidang kesehatan.

Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak serta masyarakat miskin, terutama di daerah terpencil atau daerah tertinggal melalui pembukaan akses-akses dalam bidang kesehatan. Di sisi lain, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan harapan usia hidup produktif pemerintah juga melakukan pengendalian penyebaran penyakit menular, gizi buruk, gizi lebih serta krisis kesehatan akibat bencana. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat pemerintah secara bertahap juga meningkatkan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang kesehatan serta meningkatkan peran serta Palang Merah Indonesia (PMI) dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK).

8. Meningkatkan kesejahteraan dan keahlian tenaga pendidik serta membuka akses pendidikan kepada masyarakat Aceh Barat.

Pemerintahdalam mewujudkan akselerasi mutu pendidikan umum dan pendidikan agama memberikan tunjangan kesejahteraan kepada para guru/tengku dayah agar dapat meningkat kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian dan sosial. Di samping itu, pemerintah juga membuka akses pendidikan sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memberikan beasiswa berprestasi dan bantuan pendidikan kepada putra dan putri Kabupaten Aceh Barat untuk mengikuti studi lanjut di dalam dan luar negeri.

B. Rencana Strategis Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kab. Aceh

Barat 2017-2022.

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Kecamatan Woyla Barat

Tujuan Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat tidak boleh lepas dari tujuan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022, adapun tujuan Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat adalah adalah:

1. Mewujudkan sistem pelayanan publik yang prima;
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja
3. Mewujudkan nilai-nilai dan akhlakul karimah dengan pengamalan syariat islam dan segala aspek kehidupan
4. Mewujudkan pembangunan berbasis aspirasi masyarakat.
5. Meringankan beban pengeluaran rumah tangga
6. Terwujudnya PKK kecamatan yang berdaya guna
7. Terwujudnya tata kelola dana desa yang optimal

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang ingin dirumuskan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, adapun yang menjadi sasaran Kecamatan Woyla Barat adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
2. Nilai Sakip Kecamatan.
3. Menurunkan jumlah kasus pelanggaran syariat islam yang tertangani.
4. Meningkatnya pemahaman syariat islam di masyarakat
5. Meningkatnya serapan usulan musrenbang dalam perencanaan dan penganggaran.
6. Terpenuhinya salah satu kebutuhan pokok bagi rumah tangga pra sejahtera.
7. Meningkatnya keluarga sejahtera pemberdayaan PKK kecamatan
8. Meningkatkan pengawasan terhadap dana desa

2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Sekretariat Kecamatan Woyla Barat adalah strategi dan kebijakan Kecamatan Woyla Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Kecamatan Woyla Barat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Woyla Barat selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Sekretariat Kecamatan Woyla Barat bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Woyla Barat, secara lebih rinci keterkaitan visi, misi tujuan dan sasaran Sekretariat Kecamatan Woyla Barat dapat dilihat pada table 2.2. berikut :

Tabel 2.2

Strategi dan Kebijakan

“Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegritas”				
Misi I : Mengembalikan Kabupaten Aceh Barat yang syar’i dan mewujudkan Pemerintahan Aceh Barat yang bersih				
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan sistem Pelayanan Publik yang prima	1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan Peran Loker Pelayanan Terpadu	Memperkuat SDM dan Sarana Prasarana di Loker Pelayanan Terpadu
	2	Meningkatnya kualitas pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan	Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan	Mengfokuskan pada perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintah
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	1	Nilai lakip kecamatan	Memberdayakan Pegawai Negeri Sipil dan meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana kecamatan	Memperkuat sumberdaya Pegawai dilingkup kecamatan
3. Mewujudkan nilai-nilai dan akhlakul Karimah dengan pengamalan Syariat Islam dalam segala aspek kehidupan.	1	Meningkatkan jumlah kasus pelanggaran syariat Islam yang tertangani	Meningkatkan pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam	Meningkatkan razia terhadap pelanggaran Syariat Islam
	2	Meningkatnya pengamalan Syariat Islam dalam masyarakat	Memberdayakan majelis taklim di Kecamatan	Memperkuat pelaksanaan majelis taklim dan safari shubuh di Kecamatan
4. Mewujudkan pembangunan berbasis aspirasi masyarakat	1	Meningkatnya serapan usulan Musrenbang dalam perencanaan dan penganggaran	Meningkatkan efektifitas Musrenbang reguler dan Musrenbang khusus (Perempuan, Anak dan Disabilitas)	Mengupayakan agar usulan melalui Musrenbang masuk kedalam APBK, APBA dan APBN minimal 90 % setiap tahunnya.
Misi III : Membangun ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sektor SDA dengan pengelolaan terintegrasi berlandaskan tata ruang dan peta kebencanaan				
1. Meringankan beban pengeluaran rumah tangga	1	Terpenuhinya salah satu kebutuhan pokok bagi rumah tangga pra sejahtera	Perlunya merancang perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran	Pemaafatan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan
2. Terwujudnya PKK Kecamatan yang berdaya guna		Meningkatnya pemberdayaan PKK Kecamatan	Meningkatkan pemberdayaan 10 program pokok PKK	Sosialisasi 10 Program Pokok PKK
Misi IV : Meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga kontrak (honorar) dan teungku dayah				
1. Terwujudnya tata kelola dana desa yang optimal		Meningkatkan Pengawasan terhadap dana desa	Meningkatkan pembinaan dalam pengelolaan dana desa	Mengupayakan peningkatan pengawasan untuk mempercepat penyusunan RKPG dan APBG sesuai regulasi yang berlaku

C. Penetapan Kinerja Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Tahun 2022

Adapun program dan kegiatan serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam penetapan Kinerja Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja 2021

No	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2022
1.	Meningkatnya serapan usulan Musrenbang dalam Perencanaan dan Penganggaran	Prosentase Aspirasi Masyarakat yang tertampung dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	75%
2.	Meningkatnya Keluarga Sejahtera Pemberdayaan PKK Kecamatan	Jumlah PKK Aktif	24
3.	Meningkatnya Pengamalan Syariat Islam dalam Masyarakat	Jumlah Majelis Taklim dan Safari Shubuh di Kecamatan	24
4.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi SAKIP Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	C 100%

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun tersebut ditetapkan dengan indikator kinerja dengan implementasi kepada 6 program, 11 kegiatan dan 29 sub kegiatan dengan total anggaran yang ditetapkan untuk 2017-2022 dalam Rencana Strategis Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat, dengan besaran pagu indikatif setelah perubahan Tahun Anggaran 2021 Rp. 1.629.710.998,00 Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4

Penetapan Kinerja 2017–2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2017–2022	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Total Anggaran
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Tersalurnya Aspirasi Masyarakat dalam merencanakan Pembangunan	Aspirasi Masyarakat yang tertampung dalam Musrenbang	1 Keg	75 %	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.977.500,00
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.977.500,00
	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan Sebagai Sarana Penampungan Aspirasi Masyarakat	1 Keg	300 Org	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10.977.500,00
Meningkatnya Peran serta Pemuda dan Perempuan	Jumlah PKK Aktif	1 Keg	24 Gpg	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.265.000,00
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4.265.000,00
	Terbinanya PKK dalam Kecamatan yang Baik	1	24 Gpg	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.265.000,00
Pembinaan Syariat dan Syiar Islam	Jumlah Majelis Taklim dan Safari Subuh	1 Keg	20 Kali	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	11.300.000,00
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.300.000,00
	Terlaksananya Majelis Taklim dan Safari Shubuh	1	20 Kali	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	11.300.000,00
JUMLAH					26.542.500,00

1. Rencana Kerja Kecamatan Woyla Barat 2022

LKJIP - Sekretariat Kecamatan Woyla Barat 2021

Penetapan kinerja Tahun 2022 didukung dengan 6 program, 11 kegiatan dan 29 sub kegiatan Rp. 1.629.710.998,00 sesuai dengan Rencana Strategis 2017–2022. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Rencana Kinerja 2021

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2022	
			Target	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dan tersedianya dokumen Renstra dan Renja	2	Dok
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusun dan Tersedianya Dokumen RKA SKPD	1	Dok
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusun dan Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusun dan Tersedianya Dokumen DPA-SKPD	1	Dok
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusun dan Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dok
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusun dan Tersedianya Dokumen Evaluasi Kegiatan	1	Dok
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedia Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan
8	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya Laporan Akutansi dan Keuangan	12	Bulan
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kelengkapan alat listrik kantor	12	Bulan
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	12	Bulan
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12	Bulan
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	12	Bulan
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar dan Dalam daerah	12	Bulan
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya proses surat menyurat	12	Bulan
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12	Bulan
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas	12	Bulan
No	Sasaran	Indikator	Capaian 2022	

			Target	
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	12	Bulan
20	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Bulan
21	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terbinanya PKK kecamatan	24	Gampong
22	Penyelenggaraan Mukim	Terlaksananya kegiatan Mukim	12	Org/Bulan
23	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan Unsur Muspika	4	Kali
24	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya majelis taklim, safari shubuh, rateb seuribee dan kemakmuran mesjid kecamatan	100	%
25	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa	24	Gampong
26	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	tercapainya secara maksimal terhadap efektifitas pengelolaan dan pendayagunaan aset Desa secara baik dan berkesinambungan	24	Gampong
27	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Tersedianya Sumber Daya Manusia Di Gampong Yang Baik	24	Gampong
28	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Gampong sesuai prosedur	24	Gampong
29	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Musrenbang dan Musrena tingkat kecamatan	1	kali

2. Rencana Anggaran 2022

Adapun program dan kegiatan serta pagu indikatif yang tertera di Rencana Strategis Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 adalah sebagaimana table 2.6 dibawah ini :

Tabel 2.6
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif 2022

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (output)	Capaian 2022	
			Target	Pagu Indikatif (Rp)
	SEKRETARIAT KECAMATAN WOYLA BARAT			1.754.043.756
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	80	1.754.043.756
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 DOK	8.860.000
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dan tersedianya dokumen Renstra dan Renja	2 Dok	2.074.500
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusun dan Tersedianya Dokumen RKA SKPD	1 Dok	1.497.500
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusun dan Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1.497.500
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusun dan Tersedianya Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1.383.500
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusun dan Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1.378.500
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusun dan Tersedianya Dokumen Evaluasi Kegiatan	1 Dok	1.028.500
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lancarnya Proses Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.380.269.158
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedia Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1.373.880.158
1.2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya Laporan Akutansi dan Keuangan	12 Bulan	6.389.000
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya Proses Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	81.464.128
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kelengkapan alat listrik kantor	12 Bulan	2.186.378
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	24.207.500

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (output)	Capaian 2022		
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12	Bulan	3.238.750
1.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	12	Bulan	16.300.000
1.3.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	13.672.500
1.3.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	Bulan	Bulan
1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar dan Dalam daerah	12	Bulan	20.659.000
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	12	Bulan	12.704.000
1.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	12	Bulan	12.704.000
1.4.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	12	Bulan	-
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Proses Administrasi umum Perangkat Daerah	12	Bulan	101.869.230
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya proses surat menyurat	12	Bulan	500.000
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	17.219.230
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12	Bulan	84.150.000
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	12	Bulan	23.675.000
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas	12	Bulan	20.750.000
1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	12	Bulan	2.475.000
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12	Bulan	450.000
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	100	%	61.804.240
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	17	Gp	7.500.000
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terbinanya PKK kecamatan	12	Bulan	7.500.000
2.2	Pemberdayaan Mukim	Terlaksananya Pemberdayaan Mukim	12	Bulan	54.304.240

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (output)	Capaian 2022		
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2.2.1	Pemberdayaan Mukim	Terlaksananya kegiatan Mukim	12	Bulan	54.304.240
3.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan kasus Pelanggaran ketertiban umum	100	%	3.355.000
3.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kasus pelanggaran yang diselesaikan di Kecamatan	2	2	3.355.000
3.1.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan Unsur Muspika	2	Kasus	3.355.000
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase tingkat pelaksanaan Peraturan Bupati tentang kemakmuran mesjid	100	%	24.400.000
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya majelis taklim dan safari shubuh	60	Kali	24.400.000
4.1.1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya majelis taklim, safari shubuh, rateb seuribee dan kemakmuran mesjid kecamatan	12	Bulan	24.400.000
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	RKPG dan APBG Tepat Waktu dan Persentase Aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	85	%	55.643.000
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24	Gp	55.540.000
5.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tercapainya secara maksimal terhadap efektifitas pengelolaan dan pendayagunaan aset Desa secara baik dan berkesinambungan	24	Gp	27.533.000
5.1.2	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Gampong sesuai prosedur	24	Kali	10.000.000
5.1.3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Musrenbang dan Musrena tingkat kecamatan	1	Keg	18.007.000
JUMLAH					1.754.043.756

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Tetapi esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan.

Program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik keluarannya, maupun dampak dan hasil yang diharapkan. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Oleh karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat untuk membangun akuntabilitas kinerja ini dalam mendorong pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

A. Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Woyla Barat Tahun 2022

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagai berikut :

- a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja Progres Positif

Skor	Rentang Capaian	Kategori
1	Lebih dari 85%	Sangat Baik
2	70% sampai 85%	Baik
3	60% sampai 75%	Cukup
4	≤ 60	Kurang

b. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif

Tabel 3.2.

Skala Nilai Peringkat Kinerja Progres Negatif

Skor	Rentang Capaian	Kategori
1	Lebih dari 85%	Kurang
2	70% sampai 85%	Cukup
3	60% sampai 75%	Baik
4	Kurang dari 60%	Sangat Baik

c. Kategori Efisiensi

Penentuan tingkat efisiensi ini dilihat dari persentase Capaian Indikator kinerja asumsinya adalah ketika target outcome dapat dipenuhi dan Persentase capaian tinggi maka anggaran telah digunakan secara efisien. Penetapan tingkat efisiensi ini digambarkan berdasarkan tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 3.3.

Skala Nilai Peringkat Efisiensi

Skor	Rentang Capaian	Kategori
1	Lebih dari 85%	Sangat Efisien
2	70% sampai 85%	Efisien
3	60% sampai 75%	Cukup Efisien
4	Kurang dari 60%	Kurang Efisien

Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat pada Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam Tabel 3.4. :

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %	Katagori
1	Meningkatnya serapan usulan Musrenbang dalam perencanaan dan	Persentase Aspirasi Masyarakat yang tertampung dalam dokumen	75%	75%	100	Sangat Baik

	penganggaran	perencanaan dan penganggaran				
		Jumlah peserta Musrenbang	288 Orang	288 Orang	100	Sangat Baik
		Jumlah peserta musrena	95 Orang	95 Orang	100	Sangat Baik
2	Meningkatnya Pemberdayaan PKK Kecamatan	Jumlah PKK aktif	24 Gampong	24 Gampong	100	Sangat Baik
3	Meningkatnya pemahaman Syariat Islam di masyarakat	Jumlah Majelis taklim dan safari shubuh	20 Kali	20 Kali	100	Sangat Baik
4	Meningkatnya keterkaitan antara dokumen perencanaan dan pelaporan	Nilai evaluasi SAKIP	B	B	100	Sangat Baik
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan	100%	100%	100	Sangat Baik

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan target kinerja yang telah ditetapkan, analisis atas pencapaian sasaran pada bagian ini dilakukan dengan melihat realisasi pelaksanaan program untuk setiap bidang kewenangan. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gaps*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Analisis dalam laporan ini dilakukan per indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kabupaten Aceh Barat.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Woyla Barat Tahun 2022

Sesuai hasil pengukuran kinerja selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna menyebarluaskan informasi yang transparan berkenaan dengan sebab-sebab atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditetapkan. Hingga akhir Tahun 2021 yang merupakan tahun Pertama RPJMD 2017-2022,

Kinerja Kantor Kecamatan Woyla Barattercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Untuk sasaran meningkatnya serapan usulan Musrenbang dalam perencanaan dan Penganggaran dari 3 (tiga) indikator dengan realisasi masing-masing 100%

2. Untuk sasaran meningkatnya pemberdayaan PKK Kecamatan realisasinya 100%
3. Untuk sasaran meningkatnya pemahaman Syariat Islam di kecamatan realisasinya 100%
4. Untuk sasaran meningkatnya keterkaitan antara dokumen perencanaan dan pelaporan dari 2 (dua) indicator capaian realisasi masing-masing 100%.

Akuntabilitas Keuangan

Untuk Tahun 2021 Sekretariat Kecamatan Woyla Barat memiliki Belanja Operasi sebesar Rp. 2.513.951.310,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp.2.129.996.287,00 Belanja Barang dan Jasa Rp. 383.955.023,00 dan Belanja Modal 0,00 dengan Realisasi Persentase Belanja Pegawai 99,35% dan Belanja Barang dan Jasa 98,04% sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal

No	Belanja Operasi	Anggaran
1	Belanja Pegawai	1.380.269.158,00
2	Belanja Barang dan Jasa	373.774.598,00
3	Belanja Modal	0,00
	Jumlah	1.754.043.756,00

Untuk Tahun 2021 Sekretariat Kecamatan Woyla Barat melaksanakan sebanyak 6 Program, 11 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan dengan total dana Belanja Barang dan Jasa Operasi sebesar Rp. 373.774.598,00, dan kemudian dalam Renja dan Rencana Strategis 2017-2022 Perubahan Belanja Barang dan Jasa mengalami peningkatan.

Tabel 3.6
Perbandingan Program, Kegiatan dan Rencana Kerja Sekretariat Kecamatan Woyla Barat antara Perubahan Rencana Strategis dengan Renja 2022 dan Renja Perubahan 2022

No.	Uraian Belanja Barang dan Jasa	Dana
1	Perubahan Rencana Strategis 2017-2022 untuk tahun 2021	534.781.615,00
2	Renja Sebelum perubahan 2021	413.616.523,00
3	Renja Perubahan 2021	383.955.023,00

C. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Pada tahun 2021 Belanja Operasi Sekretariat Kecamatan Woyla Barat setelah perubahan menjadi sebesar **Rp. 1.754.043.756,00** dengan realisasi **Rp. 2.491.941.829,00,-** atau 99.15% yang terdiri dari Belanja Pegawai dengan Realisasi Sebesar **Rp. 2.115.609.701,00,-** atau 95.35% dan Belanja Barang dan Jasa dengan Realisasi Sebesar **Rp. 376.332.128,00** atau 99,16%.Dapat dilihat pada tabel 3.7.berikut :

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN TA 2021	JML REALISASI RIIL	KET (%)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.361.947.290	2.344.410.529	99,26	
				13.063.500	13.063.500	100,00	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.964.000	3.964.000	100,00	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.671.000	1.671.000	100,00	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.225.000	1.225.000	100,00	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.376.000	1.376.000	100,00	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.332.000	1.332.000	100,00	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.495.500	3.495.500	100,00	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.135.592.287	2.121.205.701	99,33
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.129.996.287	2.115.609.701	99,32
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.596.000	5.596.000		100,00			
NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN TA 2021	JML REALISASI RIIL	KET (%)	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		56.877.556	54.723.800	96,21	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.420.056	1.420.056	100,00	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.015.000	20.015.000	100,00	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.930.000	1.930.000	100,00	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.950.000	4.950.000	100,00	

			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.242.500	9.242.500	100,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.320.000	17.166.244	88,85
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		111.897.037	111.094.512	99,28
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	100,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.745.037	12.942.512	94,16
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.652.000	97.652.000	100,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		44.516.910	44.323.016	99,56
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.982.910	41.811.016	99,59
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.534.000	2.512.000	99,13
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		3.186.000	3.186.000	100,00
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.186.000	3.186.000	100,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		92.508.520	89.974.300	97,26
				4.265.000	4.265.000	100,00
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.265.000	4.265.000	100,00
		Pemberdayaan Mukim		88.243.520	85.709.300	97,13
			Penyelenggaraan Mukim	88.243.520	85.709.300	97,13
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah		770.000	-	0,00
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	770.000	-	0,00
NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN TA 2021	JML REALISASI RIIL	KET (%)
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		25.700.000	24.550.000	95,53
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25.700.000	24.550.000	95,53
6	Program Pembinaan dan	Fasilitasi, Rekomendasi		29.839.500	29.821.000	99,94
			Fasilitasi Administrasi	3.000.000	3.000.000	100,00

Pengawasan Pemerintahan Desa	dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tata Pemerintahan Desa			
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.768.000	12.749.500	99,86
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.511.000	1.511.000	100,00
		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.583.000	1.583.000	100,00
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10.977.500	10.977.500	100,00
JUMLAH TOTAL			2.513.951.310	2.491.941.829	99,12

I. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota* yang terdiri dari 5 kegiatan dan 19 sub kegiatan sudah terealisasi sebesar 99,26 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 6 sub kegiatan sudah terealisasi 100%, dengan rincian :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah kebutuhan 2 dokumen dengan realisasi 100 %;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD kebutuhan 1 dokumen dengan realisasi 100 %;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD kebutuhan 1 dokumen dengan realisasi 100 %;
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD kebutuhan 1 dokumen dengan realisasi 100 %;
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD kebutuhan 1 dokumen dengan realisasi 100 %;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kebutuhan 1 dokumen dengan realisasi 100%;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan sudah terealisasi 99,33 %, dengan rincian :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN kebutuhan 12 bulan dengan realisasi 99,32 %;
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD kebutuhan 4 triwulan dengan realisasi 100 %;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan sudah terealisasi 96,21 %, dengan rincian :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kebutuhan 12 bulan dengan realisasi 100 %;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kebutuhan 12 bulan dengan realisasi 100 %;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga kebutuhan 12 bulan dengan realisasi 100 %;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor kebutuhan 12 bulan dengan

- realisasi 100 %;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan kebutuhan 12 bulan dengan realisasi 100 %;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kebutuhan 12 bulan dengan realisasi 88,85 %;
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan sudah terealisasi 99,28 %, dengan rincian :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat kebutuhan 12 bulan dengan realisasi 100 %;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kebutuhan 12 bulan dengan realisasi 94,16 %;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor kebutuhan 12 bulan dengan realisasi 100 %;
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan sudah terealisasi 99,33 %, dengan rincian :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan kebutuhan 12 bulan dengan realisasi 99,59 %;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya kebutuhan 12 bulan dengan realisasi 99,13%;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor kebutuhan 12 bulan dengan realisasi 100 %;

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan realisasi 100 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sudah terealisasi 100%, dengan rincian :
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kebutuhan 12 bulan dengan realisasi 100 %;

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan realisasi 97,26 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terdiri dari 1 sub kegiatan sudah terealisasi 100%, dengan rincian :
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan kebutuhan 1 kegiatan dengan realisasi 100 %.
2. Pemberdayaan Mukim terdiri dari 1 sub kegiatan sudah terealisasi 97,13 %, dengan rincian :
- Penyelenggaraan Mukim kebutuhan 12 bulan dengan realisasi 97,13%.

IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan realisasi 0 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah terdiri dari 1 sub kegiatan sudah terealisasi 0%, dengan rincian :
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia kebutuhan 3 kali realisasi 0%.

V. *Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum* terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan realisasi 95,53 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah terdiri dari 1 sub kegiatan sudah terealisasi 95,53 %, dengan rincian :
 - Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional kebutuhan 12 bulan dengan realisasi 95,53 %.

VI. *Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* terdiri dari 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan realisasi 99,94 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 5 sub kegiatan sudah terealisasi 99,94%, dengan rincian :
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa kebutuhan 12 bulan dengan realisasi 100 %;
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa kebutuhan 12 bulan dengan realisasi 99,86 %;
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa kebutuhan 1 kegiatan dengan realisasi 100 %;
 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa kebutuhan 1 kegiatan dengan realisasi 100 %;
 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif kebutuhan 1 kegiatan dengan realisasi 100 %.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari jumlah 6 (enam) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan terdiri 29 (dua puluh Sembilan) Sub Kegiatan, Sekretariat Kecamatan Woyla Barat menunjukkan hasil pencapaian kegiatan cukup baik dengan capaian kinerja rata-rata 99,12% walaupun masih terdapat program yang belum aplikatif. Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2022 pada hakekatnya karena berkat limpahan rahmat Allah SWT dan syariatnya hasil kerja sama yang baik dari seluruh aparatur kecamatan dan lapisan masyarakat Kecamatan Woyla Barat.

Jika terdapat indikator pencapaian sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di kemudian hari.

Dapat juga kami sampaikan kendala yang dihadapi Sekretraiat Kecamatan Woyla Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 serta dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022, antara lain :

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) aparatur pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar dinas/instansi terkait baik internal SKPD maupun external SKPD;
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung proses penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP) di Sekretariat Kecamatan Woyla Barat.

Hal tersebut diatas menjadi masalah yang sangat dirasakan dan mempengaruhi kinerja Sekretariat Kecamatan Woyla Barat, dengan demikian akuntabilitas kinerja Tahun 2021 sudah dirasa mengarah kepada tingkatan optimalisasi, baik perangkat maupun tingkat pelayanan para pegawainya, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan dan melakukan pemecahan guna terciptasuatu hasil kinerja yang produktif dalam skala yang representatif.

B. Saran – Saran

Berdasarkan kendala yang dihadapi tersebut, maka upaya serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi lainnya, antara lain :

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada SKPD Sekretariat Kecamatan Woyla Barat;
2. Meningkatkan sumber daya aparatur pelaksana program dan kegiatan dengan mengikutsertakan pegawai pada Diklat, Bimtek dan sebagainya;
3. Optimalisasi koordinasi baik internal maupun external SKPD;
4. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
5. Perlunya penambahan sarana dan prasarana yang memadai agar kinerja Sekretariat Kecamatan Woyla Barat dapat bekerja lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasi Mali , 20 Januari 2023

CAMAT WOYLA BARAT

IRWAN, M.Si

NIP. 19740626 200803 1 001